

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Seputar Indonesia Hari: Jumat Tanggal: 24 Januari 2014 Halaman: 15

## :: DISTRIBUSIKAN LEMBAR SPPT

## Pemkot Hanya Kejar PBB Rp46,7 Miliar

YOGYAKARTA – Pemkot Yogyakarta telah mendistribusikan 91.503 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB 2014. Dari perhitungan yang dilakukan, nilai pajak yang diharapkan dapat terhimpun dari PBB tahun ini mencapai Rp50,74 miliar.

Kendati demikian, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta hanya menargetkan mampu menghimpun PBB sebanyak Rp46,7 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mampu menghimpun sebesar Rp44,358 miliar.

Penerimaan PBB menempati urutan tiga besar penerimaan pajak daerah setelah pajak hotel dan BPHTB," kata Kepala Dinas DPDPK Kota Yogyakarta Kadri Renggono di sela-sela penyampaian SPPT PBB di Balaikota Yogyakarta.

Munculnya target yang masihdibawahnilaimaksimalpajak terhutang menurut Kadri, dipengharuhi masih munculnya berbagai permasalahan. Beberapa di antaranya yang terpantau adalah kebiasaan para wajib pajak membayar kewajibannya mendekati batas akhir yang telah ditentukan. Pada 2014 tanggal jatuh tempo pembayaran PBB adalah 30 September 2014.

Permasalahan lain yang ditemui adalah, masih ditemukannya wajib pajak yang tidak tertib
dalam pembayaran. Salah satu
yang mempengaruhi adalah
domisili wajib pajak yang berada
di luar kota, sehingga penyampaian SPPT menjadi terlambat.

Sementara itu tercatat di 2013lalucapaian PBB Kota Yogyakarta mampu melampaui target penerimaan yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp42 miliar, realisasi yang terhimpun mencapai 105,61%.

Mengatasi kondisi tersebut, DPDPK berencana akan melakukan kegiatan pembayaran masal PBB di Balaikota.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Titik Sulastri menyebutkan, PBB merupakan sumber dana pembangunan bagi pemerintah daerah. Dengan kondisi tersebut diharapkan, seluruh wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran PBB.

• maha deva

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Oktober 2024 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM** NIP. 19690723 199603 1 005